



LHKPN KETUA DAN ANGGOTA SERTA KASEK

Nuning Ritwanita P
Danang Eko Kristiyanto
Dini Tri Winaryani
Sudarsono
Ikhsan Nur Isfiyanto
Harli Krisnawa Adi

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
(Kepala Sekretariat)



Oleh
Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Bawaslu Kabupaten Karanganyar
Bawaslu Kabupaten Karanganyar
@BawasluKra
@Bawaslukaranganyar
@BawasluKabKaranganyar
<http://www.karanganyar.bawaslu.go.id>
<http://www.ppid-karanganyar.bawaslu.go.id>





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NUNING RITWANITA PRILIASTUTI
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 666591

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 455.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 860 m2/860 m2 di KAB / KOTA
KARANGANYAR, Rp. 455.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 20.500.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO YAMAHA Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 3.000.000
2. MOTOR, YAMAHA B3F-F-A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
17.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 40.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 517.500.000

III. HUTANG Rp. 54.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 463.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DANANG EKO KRISTIYANTO**
2. Jabatan : **ANGGOTA**
3. NHK : **951764**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	255.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 256 m2/100 m2 di KAB / KOTA BANTUL, Rp. 255.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	10.000.000
1. MOTOR, HONDA SUPRA SUPRA Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000		
2. MOTOR, HONDA HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	90.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	355.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	355.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DINI TRI WINARYANI
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 919878

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	80.000.000
1. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	6.000.000
1. MOTOR, HONDA MANUAL Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA MANUAL Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.300.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	87.300.000
III. HUTANG	Rp.	60.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	27.300.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IKHSAN NUR ISFIYANTO, S.PD. M.H
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 666601

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 660.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 510 m2/120 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, Rp. 380.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 148.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO A1F02N36M1AT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
2. MOBIL, HONDA MOBILIO DD4 1.5 RS MT CKD Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 7.700.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 55.779.756

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 871.479.756

III. HUTANG Rp. 100.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 771.479.756

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUDARSONO
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 666586

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	437.500.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/110 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 437.500.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	159.000.000
1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	23.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	16.172.830
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	636.172.830
III. HUTANG	Rp.	130.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	506.172.830

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARLI KRISNAWA ADI
2. Jabatan : KEPALA SEKRETARIAT/ KOORDINATOR SEKRETARIAT
3. NHK : 843978

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 718.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 413 m2/150 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 517.000.000
2. Tanah Seluas 78 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 147.000.000
3. Tanah Seluas 91 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 54.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 134.150.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 127.500.000
2. MOTOR, YAMAHA VEGA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 2.150.000
3. MOTOR, HONDA MEGAPRO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 37.450.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 58.089.259

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 947.689.259

III. HUTANG Rp. 276.813.064

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 670.876.195



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.